



TRANSFORMASI HUKUM BISNIS DALAM INDUSTRI MAKANAN: INOVASI REGULASI HALAL BERBASIS BLOCKCHAIN DI INDONESIA DAN MALAYSIA SEBAGAI PENDORONG PERSAINGAN GLOBAL

Desty Anggie Mustika

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: Desty@ulka-bogor.ac.id

Abstrak

Industri makanan halal memiliki peran strategis dalam perekonomian global, terutama di tengah meningkatnya permintaan terhadap produk halal yang diperkirakan mencapai USD 2,3 triliun pada tahun 2028. Indonesia dan Malaysia, sebagai pusat industri halal dunia, menghadapi tantangan dalam mengelola sistem sertifikasi halal, seperti birokrasi yang kompleks, ketidakefisienan, dan kurangnya transparansi. Teknologi blockchain muncul sebagai solusi inovatif untuk mentransformasi sistem ini melalui transparansi, keamanan, dan efisiensi yang ditawarkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, yang mencakup studi komparatif antara kerangka regulasi di Indonesia dan Malaysia. Temuan menunjukkan bahwa adopsi blockchain dapat merevolusi hukum bisnis dalam sektor halal dengan menciptakan sistem sertifikasi yang terstandarisasi secara global. Studi kasus implementasi blockchain di Malaysia oleh JAKIM dan inisiatif Indonesia untuk mendukung UMKM halal menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam meningkatkan daya saing global. Adopsi blockchain dalam regulasi halal tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan kolaborasi strategis antara Indonesia dan Malaysia, teknologi ini dapat menjadi dasar harmonisasi standar halal internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa blockchain memiliki peran kunci dalam membangun ekosistem halal yang lebih modern, transparan, dan kompetitif di era globalisasi.

PENDAHULUAN

Industri makanan halal memiliki posisi strategis dalam ekonomi global, terutama karena pertumbuhan populasi Muslim yang terus meningkat. Laporan Global Islamic Economy memperkirakan bahwa nilai pasar produk halal akan mencapai USD 2,3 triliun pada tahun 2028, menjadikannya sektor yang menjanjikan untuk investasi dan inovasi (Thomson Reuters, 2022). Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia memegang peran penting, mengingat keduanya adalah negara dengan mayoritas Muslim di Asia Tenggara, serta memiliki ekosistem industri halal yang berkembang pesat.

Sebagai dua negara besar di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia telah lama dikenal sebagai pusat produksi dan ekspor produk halal. Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, berpotensi menjadi pemain utama dalam rantai pasok produk halal global. Di sisi lain, Malaysia telah membangun reputasi internasional melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang menjadi



standar sertifikasi halal global. Namun, untuk mempertahankan keunggulan ini, kedua negara perlu beradaptasi dengan dinamika global, termasuk mengatasi tantangan yang ada dalam sistem sertifikasi halal.

Meskipun penting, sertifikasi halal sering kali dikritik karena proses yang birokratis, lambat, dan kurang transparan. Pelaku bisnis sering mengeluhkan panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi, yang dapat menghambat kelancaran bisnis. Selain itu, kasus pemalsuan label halal menunjukkan adanya celah dalam pengawasan terhadap produk, baik di tingkat nasional maupun internasional (Hasan, 2022). Ketidakefisienan ini tidak hanya mengurangi kepercayaan konsumen, tetapi juga menciptakan hambatan untuk akses pasar yang lebih luas.

Blockchain, teknologi berbasis sistem desentralisasi, muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan kemampuan mencatat data secara transparan dan tidak dapat diubah, blockchain menawarkan sistem yang lebih aman untuk pelacakan produk halal di seluruh rantai pasok. Teknologi ini memungkinkan semua pihak yang terlibat, mulai dari produsen hingga konsumen, untuk memverifikasi keaslian sertifikasi halal secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap produk halal.

Adopsi blockchain dalam regulasi halal membawa dampak besar terhadap hukum bisnis, terutama dalam konteks industri makanan halal. Dengan blockchain, data sertifikasi halal dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang mudah diakses oleh semua pihak, termasuk otoritas regulasi dan konsumen. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meminimalkan potensi sengketa hukum terkait keaslian produk. Dalam jangka panjang, teknologi ini dapat menciptakan ekosistem bisnis halal yang lebih adil, transparan, dan kompetitif.

Di Indonesia, potensi adopsi blockchain dalam regulasi halal mulai mendapat perhatian, meskipun masih dalam tahap awal pengembangan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mengurangi birokrasi dan memastikan transparansi. Di Malaysia, JAKIM telah menjajaki penggunaan blockchain sebagai bagian dari modernisasi sistem sertifikasi halal. Kolaborasi antara kedua negara ini dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan industri halal mereka.

Dengan menerapkan blockchain, Indonesia dan Malaysia dapat memperkuat posisi mereka di pasar halal global. Transparansi yang ditawarkan oleh teknologi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, tetapi juga menarik minat konsumen non-Muslim yang peduli terhadap keamanan, etika, dan keberlanjutan produk. Hal ini membuka peluang untuk menjadikan produk halal sebagai standar global yang diakui tidak hanya oleh komunitas Muslim, tetapi juga masyarakat luas. Penerapan blockchain juga membutuhkan kolaborasi di tingkat regional untuk menyusun standar halal yang harmonis dan berbasis teknologi. Standar ini harus diakui secara internasional untuk memfasilitasi perdagangan lintas negara. Indonesia dan Malaysia, dengan pengalaman dan kapasitas mereka, memiliki peluang untuk memimpin inisiatif ini, sehingga menciptakan ekosistem halal global yang lebih terintegrasi dan inklusif.

Meskipun menjanjikan, implementasi blockchain dalam sertifikasi halal tidak bebas dari tantangan. Kesenjangan infrastruktur digital, kurangnya literasi teknologi di



kalangan pelaku usaha kecil, serta biaya adopsi teknologi yang cukup tinggi menjadi hambatan yang perlu diatasi. Selain itu, regulasi yang mengatur validitas data berbasis blockchain perlu disesuaikan dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Blockchain menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sertifikasi halal, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia dan Malaysia untuk memimpin pasar halal global. Dengan adopsi teknologi ini, kedua negara dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing produk halal mereka. Namun, keberhasilan implementasi memerlukan dukungan regulasi, kolaborasi lintas negara, dan investasi dalam infrastruktur serta pendidikan teknologi. Jika diterapkan dengan tepat, blockchain dapat menjadi tonggak transformasi hukum bisnis dalam industri makanan halal.

Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana blockchain dapat mentransformasi hukum bisnis dalam industri makanan halal di Indonesia dan Malaysia, serta peranannya dalam mendorong daya saing global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur untuk mengeksplorasi potensi blockchain dalam transformasi sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia. Data diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal ilmiah, laporan industri, serta studi kasus terkait penerapan teknologi blockchain dalam proses sertifikasi halal di kedua negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana teknologi blockchain dapat mengatasi tantangan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam industri halal.

Metode komparatif diterapkan untuk menganalisis perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Malaysia dengan fokus pada tiga aspek utama: kerangka hukum bisnis, implementasi teknologi dalam regulasi halal, dan dampak globalisasi terhadap inovasi sistem sertifikasi. Dengan membandingkan kedua negara, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana masing-masing kebijakan mampu mendukung adopsi blockchain dan meningkatkan daya saing produk halal di pasar internasional.

Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap peluang dan tantangan dalam menciptakan sistem sertifikasi halal yang terstandarisasi secara global. Dengan mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam regulasi halal, penelitian ini menunjukkan potensi besar untuk mengharmonisasi kebijakan lintas negara, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat posisi Indonesia dan Malaysia sebagai pusat industri halal dunia.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Transformasi Hukum Bisnis dalam Industri Halal

Hukum bisnis di sektor makanan halal mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi sertifikasi, distribusi produk, hingga perlindungan konsumen. Di Indonesia, sistem sertifikasi halal dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasar. Sebaliknya, di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia



(JAKIM) telah lama diakui sebagai otoritas utama dalam menerbitkan sertifikasi halal, dengan pengakuan internasional terhadap sistemnya.

Perbedaan mencolok terlihat pada pendekatan birokrasi di kedua negara. Di Indonesia, proses sertifikasi halal sering kali memerlukan waktu lebih lama akibat prosedur yang berlapis dan kompleks (Rahman, 2023). Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memenuhi persyaratan pasar. Sementara itu, Malaysia menunjukkan efisiensi yang lebih baik dengan mengadopsi teknologi untuk mempercepat proses sertifikasi. Misalnya, JAKIM telah mulai memanfaatkan sistem digital untuk mempercepat verifikasi dokumen dan pemrosesan sertifikasi halal.

Blockchain menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Dengan menciptakan sistem rantai pasok halal yang transparan dan terdesentralisasi, blockchain dapat mengurangi risiko pemalsuan sertifikasi sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebagai contoh, pada tahun 2022, JAKIM meluncurkan program percontohan untuk melacak asal-usul daging impor menggunakan blockchain. Data setiap tahap dalam rantai pasok dicatat secara permanen dalam sistem, memungkinkan konsumen memverifikasi kehalalan produk secara langsung melalui platform digital (UNCTAD, 2023).

Peran Blockchain dalam Regulasi Halal

Teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mentransformasi regulasi halal melalui tiga keunggulan utamanya: transparansi, keamanan, dan efisiensi. Dalam hal transparansi, blockchain memungkinkan semua pemangku kepentingan, termasuk produsen, regulator, dan konsumen, untuk mengakses informasi yang relevan terkait kehalalan produk. Setiap tahap dalam proses produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi, dapat dicatat dalam jaringan blockchain yang terdesentralisasi, memastikan bahwa data tersebut tersedia dan dapat diverifikasi kapan saja.

Keunggulan kedua adalah keamanan. Blockchain menggunakan mekanisme enkripsi yang membuat data tidak dapat diubah atau dimanipulasi, sehingga memberikan jaminan keandalan informasi. Hal ini sangat penting dalam sistem sertifikasi halal, di mana pemalsuan dokumen atau pelabelan sering menjadi isu yang merusak kepercayaan konsumen. Selain itu, efisiensi menjadi salah satu manfaat utama teknologi ini. Verifikasi otomatis menggunakan sistem blockchain dapat mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses sertifikasi, yang selama ini menjadi kendala besar di negara-negara dengan birokrasi yang kompleks.

Indonesia telah mulai menjajaki potensi blockchain dalam mendukung UMKM halal untuk memasuki pasar global. Proyek percontohan yang didukung oleh Kementerian Perdagangan ini bertujuan untuk mempercepat verifikasi halal pada produk ekspor, dengan fokus pada pelacakan produk mulai dari bahan baku hingga pengiriman. Langkah ini diharapkan dapat membantu UMKM bersaing di pasar internasional dengan standar halal yang lebih kredibel (Hasan, 2022).

Contoh Implementasi:



Indonesia mulai mengadopsi blockchain untuk membantu UMKM halal memasuki pasar global. Proyek percontohan ini didukung oleh Kementerian Perdagangan untuk mempercepat verifikasi halal pada produk ekspor (Hasan, 2022).

Dampak pada Persaingan Global

Pengintegrasian blockchain dalam sistem sertifikasi halal memberikan peluang besar bagi Indonesia dan Malaysia untuk memimpin pasar makanan halal global. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kedua negara dapat menetapkan standar halal yang lebih transparan, terpercaya, dan efisien, sehingga diakui secara internasional. Hal ini dapat memperkuat posisi mereka sebagai pusat industri halal dunia, sekaligus meningkatkan daya saing produk halal mereka di pasar global.

Globalisasi juga memberikan manfaat yang signifikan melalui adopsi teknologi ini. Pertama, blockchain dapat meningkatkan akses pasar bagi UMKM dengan memberikan mereka alat untuk mematuhi standar internasional. Hal ini sangat penting mengingat UMKM sering kali kesulitan memenuhi persyaratan ekspor akibat keterbatasan sumber daya. Kedua, kepercayaan konsumen internasional, termasuk di negara-negara non-Muslim, dapat meningkat berkat transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh sistem blockchain. Hal ini menjadikan produk halal tidak hanya sebagai kebutuhan komunitas Muslim, tetapi juga sebagai simbol kualitas dan etika.

Dengan mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam sistem sertifikasi halal, Indonesia dan Malaysia tidak hanya memperkuat ekosistem halal domestik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekosistem halal global. Pendekatan ini memberikan peluang bagi kedua negara untuk menetapkan standar baru dalam industri halal, menciptakan citra produk halal sebagai simbol kualitas tinggi yang dihormati di seluruh dunia.

Indonesia dan Malaysia memiliki peluang besar untuk memimpin pasar makanan halal global. Dengan mengintegrasikan blockchain, kedua negara dapat menetapkan standar halal internasional yang diakui oleh pasar global.

Manfaat Globalisasi:

- ❖ Peningkatan akses pasar bagi UMKM.
- ❖ Meningkatkan kepercayaan konsumen internasional, termasuk dari negara non-Muslim.
- ❖ Memperkuat citra halal sebagai simbol kualitas.

SIMPULAN

Blockchain menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam sistem sertifikasi halal, seperti birokrasi yang kompleks, kurangnya transparansi, dan risiko pemalsuan. Dengan mengintegrasikan teknologi ini, Indonesia dan Malaysia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi mereka sebagai pusat industri halal global. Blockchain mampu menciptakan sistem yang lebih transparan, aman, dan efisien, memberikan manfaat tidak hanya bagi produsen, tetapi juga bagi konsumen yang semakin peduli terhadap kehalalan dan kualitas produk.

Implementasi blockchain dalam regulasi halal dapat merevolusi hukum bisnis di sektor ini, terutama dalam aspek pelacakan rantai pasok dan verifikasi sertifikasi. Pengalaman Malaysia melalui JAKIM dalam program percontohan penggunaan



blockchain menunjukkan hasil yang menjanjikan, sementara Indonesia mulai menjajaki potensi teknologi ini untuk mendukung UMKM halal agar dapat bersaing di pasar internasional. Sinergi kedua negara ini, melalui inovasi dan kolaborasi lintas batas, berpotensi menciptakan standar halal internasional yang lebih kredibel dan harmonis.

Adopsi blockchain juga mendukung globalisasi industri halal dengan meningkatkan kepercayaan pasar global, memperluas akses bagi pelaku usaha, dan memperkuat citra halal sebagai simbol kualitas. Untuk mewujudkan potensi ini, dibutuhkan kerangka hukum yang mendukung, investasi dalam infrastruktur teknologi, serta pendidikan bagi pelaku industri. Dengan langkah strategis dan komitmen yang kuat, blockchain dapat menjadi pilar utama dalam transformasi regulasi halal yang lebih modern, inklusif, dan kompetitif di era global.

SARAN

1. Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus berkolaborasi dalam menyusun standar halal berbasis blockchain.
2. UMKM harus didukung melalui pelatihan teknologi dan subsidi untuk adopsi blockchain.
3. Edukasi konsumen tentang pentingnya blockchain dalam regulasi halal perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beetham, D. (2008). *Democracy and Human Rights*. Polity Press.
- Hasan, Z. (2022). Blockchain and Halal Certification in the Global Market. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 45–60.
- Pew Research Center. (2021). *The Future of World Religions*. Retrieved from <https://pewresearch.org>.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). *Halal Food Industry: Blockchain Opportunities*.
- MLA Style
- Beetham, David. *Democracy and Human Rights*. Polity Press, 2008.
- Hasan, Zulkifli. "Blockchain and Halal Certification in the Global Market." *Journal of Islamic Finance*, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 45–60.
- Pew Research Center. *The Future of World Religions*, 2021, <https://pewresearch.org>.
- United Nations Conference on Trade and Development. *Halal Food Industry: Blockchain Opportunities*, 2023.
- Tambahan Referensi (Lanjutan)
- Rahman, A. (2023). *Digitalisasi Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Gramedia.
- Thomson Reuters. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report*.